CREDENDUM : Jurnal Pendidikan Agama *e-ISSN : 2714-8327*
https://doi.org/10.34150/credendum.v2i2.1049

KATEKIS SEBAGAI AGEN DEKOLONIAL DALAM PERSPEKTIF PAULO FREIRE: IMPLEMENTASI SKEMA KOLABORATIF KATOLIK-POLITIK ARMADA RIYANTO

Efrem Dwi Valencio Dowa Lego
STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia
dwilego0@gmail.com

Abstract

This article aims to explore the role of catechists in the Catholic Church as agents of decolonization in Indonesia, examined using Paulo Freire's ideas on liberation education and conscientization. The results of this exploration are an implementation of Armada's ideas on the Collaborative Catholic and Political Scheme. This research uses a literature study method. Literature study is a method of collecting data through scholarly writings that helps achieve the objectives of the writing. This research shows that catechists are not only faith educators but can also be agents of decolonization. Catechists can help the community strive for the common good within the nation's life system. The role of a catechist is not only as a teacher who educates the faith but also as a guide to the congregation to foster critical awareness, build solidarity, and drive social change.

Keywords: *catechist; critical education; decolonization*

I. PENDAHULUAN

Gereja Katolik mempunyai daya untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu dimulai dari kesadaran diri sendiri, akan pribadi yang bebas dari belenggu apapun. Pribadi yang membebaskan dirinya dari mentalitas "dijajah" dan berusaha untuk memiliki kesadaran kritis serta mengembangkannya adalah contoh tindakan dekolonial. Salah satu peran yang sangat signifikan di Gereja Katolik dalam mengusahakan sikap dekolonial agar dimiliki umat adalah katekis. Katekis adalah pendidik iman yang tinggal di tengah-tengah umat dan bersentuhan secara langsung dengan umat yang sederhana (Satitis & Supriyadi, 2020).

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sota & Wijaya (2021); Satitis & Supriyadi (2020); dan Rani & Dewantara (2023) membahas tentang katekis, namun penekanannya masih pada sisi pembinaan pribadi katekis itu sendiri. Sehingga, yang membedakan dari penelitian ini adalah adanya penekanan pada peran signifikan katekis yang tidak hanya sebagai pendidik iman tetapi juga sebagai agen dekolonial. Penelitian ini bermanfaat untuk

menyadarkan peran katekis yang tidak hanya dalam lingkup Gereja tetapi juga pengajaran dalam konteks sosio-politis demi terwujudnya dekolonisasi yang bermuara pada *bonum commune* (kebaikan bersama).

Penelitian ini membahas tentang konsep dekolonisasi dan skema kolaboratif Katolik-Politik menurut Armada Riyanto serta pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan dan konsientisasi, serta peran katekis dalam Gereja Katolik sebagai kajian teoretis. Kajian teoretis ini menjadi dasar untuk menjawab beberapa rumusan masalah tentang bagaimana konsep dekolonisasi, pendidikan pembebasan Freire, dan skema Katolik-politik dapat digunakan untuk memahami peran katekis sebagai agen dekolonial?; bagaimana katekis dapat mengembangkan kesadaran kritis umat dan membebaskan dari mentalitas terjajah dalam konteks sosio-politis Indonesia?; serta apa saja tantangan dan peluang penerapan pendekatan Freirean dalam praksis katekese dekolonial?

Penelitian ini bertujuan menguraikan secara komprehensif landasan teoretis peran katekis, menegaskan bahwa katekis tidak sekadar pendidik iman tetapi juga agen dekolonial yang berkontribusi pada transformasi kesadaran umat, menganalisis tantangan praksis dekolonial bagi katekis di Indonesia, serta mengafirmasi kontribusi katekis dalam mendorong dekolonisasi demi terwujudnya *bonum commune*. Pembahasan ini ditutup dengan suatu kesimpulan yang sekaligus menunjukkan kebaruan artikel ini yaitu peran katekis tidak hanya memiliki peran seputar kegiatan hidup menggereja tetapi juga berperan dalam kehidupan sosio-politik sebagai agen dekolonial.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Dekolonisasi Menurut Pemikiran Armada Riyanto

Dekolonisasi adalah usaha untuk membongkar ideologi kolonial (kolonisasi atau mentalitas terjajah). Para penjajah tidak lagi hadir dalam wujud tentara Belanda, Portugis, atau Jepang (yang pernah menjajah Indonesia). Para penjajah itu hadir dalam pola pikir yang terikat dengan konsep-konsep rasional kolonial yang masih ada hingga saat ini dengan bentuk-bentuk yang baru. Metode dekolonisasi menyiratkan pendekatan interpretatif yang tidak bergantung pada struktur-struktur perbudakan, yaitu struktur kekuasaan (aparat negara), sistem budaya, ideologi politik, lembaga atau doktrin agama, struktur linguistik yang berakar di masa lalu, serta mitos, legenda, atau pesan yang masih bergema hingga saat ini. Studi dekolonosasi bertujuan untuk mengkritisi dan membongkar pola pikir yang terbelenggu (Riyanto, 2025).

Ada perbedaan antara pascakolonial dan dekolonisasi. Pascakolonial lebih mengarah pada realitas yang terjadi setelah koloniaslisme berakhir, sedangkan dekolonisasi menyatakan bahwa kolonialisme belum berakhir dan masih

berlangsung hingga hari ini dalam wujud yang berbeda. Era kolonial ditandai dengan adanya pasukan penjajah untuk menandai, sedangkan dekolonisasi ditandai dengan residu kolonialisme dalam wujud mentalitas terjajah. Dekolonisasi bertujuan untuk menganalisis, mengkritik, dan menolak "kekuatan" yang dipaksakan oleh kolonialisme pada setiap aspek masyarakat sehari-hari. Studi paradigma mengkritik model klasifikasi manusia yang dipaksakan oleh otoritarianisme kapitalis modern melalui berbagai perspektif klasifikasi (Riyanto, 2025).

2.1.2 Skema Kolaboratif: Katolik dan Politik menurut Armada Riyanto

Armada Riyanto (2025) melihat secara mendalam kenyataan sejarah masa lalu tentang relasionalitas agama Katolik dan politik. Armada menunjukkan bahwa umat Katolik, Uskup, dan para Imam pada masa penjajahan tidak tinggal diam melihat masalah yang terjadi. Salah satu contoh partisipasi umat Katolik dalam dekolonisasi adalah penggunaan gedung Pemuda Katolik atau pada saat itu lebih dikenal dengan nama *Katholieke Jongelingen Bond* sebagai tempat rapat pertama Kongres Pemuda II (Rista & Budianto, 2024). Para Misionaris Kongregasi Misi yang berkarya di Keuskupan Surabaya juga ambil bagian dalam melawan penjajahan lewat karya pendidikan dan juga kritik terhadap pemerintah kolonial.

Aktivitas politik umat dan para Romo CM yang telah diuraikan tersebut hanyalah segelintir fakta yang dapat menjadi contoh tentang relasionalitas antara Gereja Katolik dan kehidupan politik yang terjadi di masa lampau. Katolik mengajarkan umat untuk meneguhkan kehadiran Kerajaan Allah di dunia melalui kesaksian iman dalam hidup sehari-hari untuk hidup dalam persekutuan yang satu. Sifat yang satu itu semakin mengeratkan relasi dengan sesama dalam hidup bersama. Ajaran Agama Katolik dan politik tidak berseberangan, melainkan berjalan beriringan secara harmonis. Relasi keduanya dapat membangun fondasi kehidupan manusia yang utuh dan bermartabat (Riyanto, 2025).

2.1.3 Pemikiran Paulo Freire tentang Konsientisasi

Salah satu cara untuk meraih keadaan dekolonial yaitu dengan pendidikan. Pendidikan dapat membuat masyarakat terbebas dari penindasan dan keterbelengguan. Kebebasan itu bisa diraih bila ada kesadaran akan ketertindasan. Pendidikan diperlukan untuk membebaskan dari sistem yang membuat masyarakat terpuruk, atau setidaknya pendidikan dapat membuat masyarakat memiliki kesadaran yang kritis akan situasi kehidupannya. Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sangat relevan untuk masyarakat Indonesia saat ini, termasuk dalam konteks Gereja. Paulo Freire menawarkan pendidikan yang membebaskan masyarakat dari keterbelengguan dan penindasan. Pembebasan masyarakat tertindas yang diinginkan Paulo Freire adalah pembebasan yang memungkinkan

orang menjadi manusia yang sadar dan berpartisipasi dalam perubahan kehidupan di sekitarnya (Sardy, 1983).

Paulo Freire mengusulkan jalur pengembangan kesadaran yang mengarah pada pembebasan. Proses ini disebut *conscientizacao* yang berarti suatu tingkat kesadaran yang dapat memampukan seseorang mengkritisi sistem sosial yang ada (Smith, 2008). Tiga tingkat kesadaran yang dinyatakan oleh Freire (1973) yaitu kesadaran magis, murni, dan kritis. *Conscientizacao* atau biasa disebut konsientisasi adalah pendorong masyarakat yang tertindas untuk memahami lingkungan hidup dan menemukan cara untuk melepaskan diri dari kungkungan struktural yang telah ada selama bertahun-tahun (Freire, 1972). Freire menawarkan suatu cara yang disebut *praxis.* Istilah ini mengungkapkan perpaduan antara kehendak, ucapan, dan kerja, karena manusia pada hakikatnya merupakan kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan. Dengan cara ini, pendidikan merangsang tindakan, kemudian merefleksikan tindakan tersebut, dan dari refleksi tersebut muncul tindakan yang baru dan lebih baik, sebab melalui praktik, manusia dapat mengubah dunia sekitar dengan bertindak secara konkret dalam dunia yang mereka hadapi (Freire, 1972).

Freire berpendapat bahwa dengan konsientisasi, masyarakat terbelakang tidak hanya menjadi kritis terhadap diri sendiri, tetapi juga kritis terhadap realitas yang mereka alami, selain itu masyarakat juga dapat melihat kondisi-kondisi yang menghambat perkembangan mereka dan melepaskan diri dari kondisi kehidupan yang membelenggu dan menindas. Lebih jauh lagi, konsientisasi menumbuhkan kesadaran sejati akan memperkuat kesadaran kolektif, persaudaraan, dan solidaritas, serta membawa rasa harapan yang kuat. Pemikiran Freire itu menemukan resonansinya dengan praktik katekis. Praktik katekis bukan sekadar penyampaian doktrin, melainkan pendampingan dialogis yang membangkitkan kesadaran iman dan kesadaran sosial umat. Praktik katekis yang mengikuti paradigma Freire menjadi ruang bagi umat untuk membaca Kitab Suci sekaligus membaca realitas hidup mereka secara kritis, sehingga mereka mampu mengenali bentuk-bentuk penindasan, mentalitas terjajah, serta menemukan cara Kristiani untuk membebaskan diri. Dengan demikian, konsientisasi menjadi fondasi pedagogis bagi katekis agar dapat menjadi agen dekolonial dalam konteks Indonesia.

2.1.4 Peran Katekis dalam Gereja Katolik

Tata keselamatan di dalam dunia tidak hanya diusahakan oleh para klerus, biarawan, dan atau biarawati. Umat awam juga dapat mengambil bagian dalam tata keselamatan itu. Partisipasi umat dalam merasul memiliki peran yang sangat signifikan dalam tata keselamatan di dunia ini. Kehadiran Gereja hampir tidak mungkin terwujud secara nyata tanpa peran serta aktif mereka (Paus Paulus VI, 1965). Gereja dipercaya bukan hanya untuk mewartakan Injil Kristus dan

menyebarkan rahmat-Nya ke seluruh dunia, tetapi juga untuk memasuki dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Oleh karena itu, dalam memenuhi misi Gereja, kaum awam menjalankan fungsi kerasulan mereka tidak hanya di dalam Gereja tetapi juga di dalam masyarakat, baik secara rohani maupun duniawi. Dalam kedua bidang tersebut, sebagai umat awam yang juga anggota masyarakat, wajib berpegang dan melaksanakan arahan suara hati Kristiani (Paus Paulus VI, 1965).

Konsili Vatikan II menunjukkan bahwa konsekuensi ajarannya yaitu umat beriman tidak boleh menolak untuk berpartisipasi dalam "kehidupan umum", yaitu di bidang ekonomi, sosial, hukum, politik, dan budaya, dan harus memajukan kesejahteraan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kelembagaannya. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pemajuan dan pembelaan prinsip-prinsip seperti tata hidup yang damai, hak asasi manusia, kesetaraan, solidaritas, keadilan, penghormatan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan Konsili mengajak umat Kristiani untuk berusaha melaksanakan kewajiban mereka di dunia ini (Paus Yohanes Paulus II, 1979). Salah satu cara umat awam dalam melakukan kewajiban itu adalah dengan berkatekese. Pada dasarnya, katekese diperlukan untuk pertumbuhan iman dan kesaksian Kristiani dalam masyarakat. Katekese bertujuan untuk memperlengkapi umat Kristiani agar mampu menanggung siapa pun yang akan meminta pertanggungjawaban mereka atas pengharapan yang dipercayakan kepada mereka (Paus Yohanes Paulus II, 1979).

Katekis dipanggil untuk menjadi kudus dengan cara mewartakan Sabda Tuhan. Katekis bertugas sebagai perantara yang menyampaikan firman Tuhan kepada para murid. Tugas katekis tidak hanya berhenti pada pewartaan, tetapi juga bimbingan. Katekis bertugas untuk mewartakan dan membimbing para murid yang dipercayakan Tuhan kepadanya (Satitis & Supriyadi, 2020). Tugas dalam panggilan ini memang berasal dari Tuhan, namun peran manusia yang menanggapi panggilan itu juga tidak bisa diabaikan. Tanggapan itu terwujud dari pewartaan dan bimbingan. Kedua hal itu mencerminkan kepedulian pada sesama dan memuat harapan akan terciptanya suatu kehidupan yang rukun dan damai, tidak hanya bagi saudara seiman tetapi juga kepada semua orang. Menurut Wiyesi & Lan (2025), apa yang dilakukan seorang katekis atau pendidik adalah suatu sikap kepedulian sosial. Katekis memiliki peran membantu umat Allah dan warga masyarakat untuk mengusahakan kesejahteraan umum di dunia. Katekis adalah seorang pengajar iman yang juga bagian dari dunia ini. Keadaan tersebut membawa dampak positif yaitu pembinaan iman yang diberikan oleh katekis sesuai dengan konteks dunia (Rani & Dewantara, 2023). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa katekis tidak hanya bekerja demi kerajaan Allah tetapi juga bagi kebaikan dunia.

Terdapat keterkaitan teori Freire dan tugas katekis dalam rangka pemikiran peran katekis dalam Gereja Katolik. Katekis memiliki posisi strategis untuk

menghidupkan konsientisasi dalam konteks Gereja, yakni sebagai pendidik iman yang hidup dan berakar di tengah umat. Katekis tidak hanya menyampaikan iman, tetapi juga menolong umat membaca realitas sosial-politik secara kritis, mengenali bentuk-bentuk penindasan dan mentalitas terjajah, serta menemukan respons Kristiani yang membebaskan. Dialog, refleksi bersama, dan tindakan nyata dalam terang Injil, sebagaimana ditegaskan oleh Freire dalam *praxis*, menjadi metode yang selaras dengan pedagogi katekese. Dengan demikian, peran katekis bukan hanya untuk membina kehidupan menggereja, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kritis umat agar mampu berpartisipasi dalam transformasi sosial. Katekis menjadi agen yang menjembatani iman dan realitas hidup, sehingga katekese berperan sebagai proses dekolonisasi yang mengarah pada kesejahteraan umum.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif reflektif-teologis dengan metode studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dari beberapa literatur yang mendukung penelitian (Adlini, et al., 2022). Literatur dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yakni teks-teks yang secara langsung membahas konsep dekolonisasi, pendidikan pembebasan, konsientisasi, relasi Katolik-politik, serta peran katekis. Karena itu, karya Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan, pemikiran F.X. Armada Riyanto mengenai kolaborasi Katolik-politik, serta dokumen Gereja terkait katekese dan keterlibatan sosial dipilih sebagai sumber utama.

Sumber-sumber tersebut dilengkapi dengan artikel akademik terbaru yang mendukung pemahaman mengenai dinamika peran katekis di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik-analitis terhadap teks-teks yang dikaji itu. Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti menafsirkan makna konseptual dan praksis dari gagasan Freire dan Armada Riyanto secara mendalam, sementara analisis kontekstual digunakan untuk menghubungkan temuan teoretis dengan realitas sosio-politis Gereja Katolik di Indonesia. Metode ini dianggap tepat karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, penafsiran, dan integrasi gagasan-gagasan teologis-filosofis dalam rangka merumuskan peran katekis sebagai agen dekolonial. Dengan demikian, metode kualitatif reflektif-teologis melalui studi pustaka memungkinkan eksplorasi konseptual yang komprehensif sekaligus relevan secara kontekstual bagi tujuan penelitian ini.

2.3 Hasil Penelitian dan Diskusi

2.3.1 Sejarah Kontribusi Agama Katolik dalam Politik di Indonesia: Suatu Aksi Dekolonisasi

Dekolonisasi adalah proses yang melampaui sekadar pembebasan dari penjajahan fisik. Dekolonisasi merupakan usaha mendalam untuk membongkar dan

membebaskan diri dari warisan ideologis kolonial yang masih hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, termasuk cara berpikir, sistem kekuasaan, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya. Meskipun para penjajah secara fisik telah pergi, struktur dan mentalitas kolonial tetap bertahan dalam bentuk baru yang lebih terselubung. Pola pikir kolonial hadir dalam sistem pendidikan, bahasa, ideologi politik, bahkan dalam moral sosial yang diwariskan dari masa penjajahan. Oleh karena itu, dekolonisasi sejati menuntut pembebasan total bukan hanya dari penjajahan luar, tetapi juga dari penjajahan batin dan struktural yang menghambat kebebasan berpikir dan eksistensi manusia yang merdeka (Riyanto, 2025).

Dalam konteks ini, pendekatan dekolonial menolak dominasi struktur lama dan memperjuangkan interpretasi baru atas manusia sebagai makhluk yang bebas, setara, dan bermartabat, sebagaimana sebelum kolonialisme hadir. Dekolonisasi tidak tunduk pada sistem kekuasaan, budaya dominan, atau warisan mitologi dan bahasa kolonial, sebaliknya menekankan kebebasan akal budi yang tidak takut terhadap otoritas, serta memperjuangkan kedaulatan manusia atas sejarah dan identitasnya sendiri. Pendekatan ini menolak "rasionalitas kolonial" yakni cara berpikir yang berakar pada hierarki, penguasaan, dan dominasi dan menggantikannya dengan pemahaman yang memuliakan martabat dan kebebasan manusia. Dekolonisasi bukanlah tentang menolak atau menghapus masa lalu, tetapi tentang merekonstruksi cara pandang terhadap sejarah dan struktur kuasa yang masih membentuk kehidupan masa kini. Dekolonisasi adalah upaya untuk menafsir ulang relasi-relasi historis, membongkar fondasi kekuasaan yang tidak adil, dan menegaskan kembali kemanusiaan sebagai pusat dari seluruh struktur kehidupan. Ini adalah proses pembebasan berkelanjutan yang tidak berhenti pada wacana, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di berbagai bidang kehidupan, termasuk politik dan agama (Riyanto, 2025).

Salah satu aspek penting dari dekolonisasi di Indonesia adalah keterlibatan umat Katolik dalam perjuangan tersebut. Sejak masa penjajahan, umat Katolik, baik awam maupun rohaniwan, telah berperan aktif dalam aksi dekolonial (Riyanto, 2025). Mereka tidak tinggal diam di tengah ketidakadilan, tetapi ambil bagian dalam memperjuangkan hak dan martabat bangsa. Keterlibatan umat Katolik dalam proses dekolonisasi tidak dapat dibaca hanya sebagai kontribusi sosial atau kebetulan historis. Secara lebih mendasar, tindakan umat Katolik pada masa penjajahan merupakan bentuk resistensi terhadap struktur kolonial yang menempatkan pribumi sebagai subjek pasif dan inferior. Sebagai contoh, pada masa pergerakan nasional, gedung milik Pemuda Katolik (*Katholieke Jongelingen Bond*) menjadi tempat penyelenggaraan rapat pertama Kongres Pemuda II, yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda, suatu peristiwa penting yang menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak sekadar menjadi catatan sejarah, tetapi menandai pergeseran penting yang menunjukkan bahwa umat Katolik masuk

ke ruang publik sebagai agen politik yang turut membentuk identitas kebangsaan. Mereka merebut kembali ruang yang sebelumnya dikontrol oleh kolonialisme, dan menjadikannya arena artikulasi kesadaran kebangsaan.

Lebih dari itu, para misionaris dari Kongregasi Misi (CM) di Keuskupan Surabaya juga memainkan peran penting dalam proses dekolonisasi melalui bidang pendidikan dan kritik sosial. Romo Van Megen, de Backere, dan Bastiaensen mendirikan lembaga pendidikan bagi anak-anak Jawa dengan tujuan mencerdaskan dan memerdekakan mereka dari kebodohan yang dipertahankan oleh sistem kolonial. Misi pendidikan para misionaris CM tidak hanya bertujuan melayani umat, tetapi secara substantif merupakan aksi melawan struktur kolonial. Sistem kolonial Belanda mempertahankan ketimpangan akses pendidikan untuk menjaga hirarki sosial. Dengan membuka sekolah bagi anak-anak Jawa, para misionaris masuk ke ruang yang secara politis sensitif, mereka mengintervensi mekanisme reproduksi ketertindasan. Tindakan ini bukan sekadar pelayanan rohani, tetapi bentuk politik perlawanan epistemik, karena mereka memperluas distribusi pengetahuan yang oleh kolonialisme disempitkan untuk menjaga dominasi.

Sementara itu, Romo Smets, CM, secara terbuka mengkritik pemerintah kolonial atas diskriminasi terhadap buruh pribumi (Riyanto, 2025). Tindakan-tindakan ini mencerminkan bahwa relasi antara Gereja Katolik dan kehidupan politik bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari kesaksian iman dan perjuangan sosial yang nyata. Di sini Gereja tampil bukan sebagai lembaga kolonial, tetapi sebagai aktor yang secara teologis dan sosial menegaskan martabat manusia di hadapan sistem yang merendahkannya. Relasi antara Gereja Katolik dan politik terus berlanjut hingga era modern. Keterlibatan umat Katolik dalam era pascakemerdekaan juga perlu dibaca dalam kerangka analitis serupa. Dalam sejarah Indonesia pascakemerdekaan, banyak umat Katolik yang berperan aktif di pemerintahan maupun di ranah sosial, mereka adalah Yos Sudarso, Frans Seda, Ignasius Kasimo, dan Cornel Simanjuntak (Cipta, 2020).

Para tokoh tersebut merupakan representasi bahwa identitas Katolik tidak identik dengan keterpinggiran politik. Kehadiran mereka membongkar narasi kolonial yang memposisikan umat Katolik sebagai minoritas yang tidak memiliki peran dalam pembentukan bangsa. Dengan demikian, sejarah keterlibatan umat Katolik menunjukkan pola konsisten memasuki ruang-ruang yang sebelumnya dikonstruksi secara kolonial sebagai ruang bukan-milik mereka, dan melalui kehadiran itu menegaskan kembali martabat, kesetaraan, dan kapasitas politik umat beriman. Namun, keterlibatan dalam politik tidak selalu berarti memegang jabatan publik. Umat Katolik tetap berkontribusi dalam kehidupan bangsa melalui berbagai bentuk pelayanan, advokasi sosial, pendidikan, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Semua bentuk keterlibatan ini adalah bentuk konkret dari dekolonisasi.

Dengan kata lain salah satu aksi dekolonisasi yakni keterlibatan dalam membangun bangsa yang adil, setara, dan bermartabat.

Secara teologis, Agama Katolik tidak menempatkan dirinya dalam oposisi terhadap politik. Sebaliknya, ajaran Katolik meneguhkan panggilan setiap orang beriman untuk mewujudkan Kerajaan Allah di dunia melalui kehidupan sehari-hari (Paus Paulus VI, 1965). Salah satu sifat Gereja, yaitu "Katolik". Kata "Katolik" berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti berhubungan dengan semua atau keseluruhan. Gereja adalah Katolik karena Kristus memanggil Gereja untuk mengakui keseluruhan iman, untuk menjaga semua sakramen, dan mewartakan kabar Gembira kepada semua orang dan diutus ke seluruh bangsa. Sifat ini mendorong umat untuk hidup dalam persekutuan dan membangun relasi yang harmonis dengan sesama (KGK 820-822, 830-831, 849-856). Pemahaman ini memiliki implikasi dekolonial yang kuat. Jika kolonialisme membangun struktur politik untuk melayani kepentingan kuasa, ajaran tentang *bonum commune* justru menuntut pembalikan radikal politik harus diletakkan kembali pada martabat manusia, bukan pada dominasi. Dengan demikian, partisipasi politik umat Katolik bukan hanya aktivitas sosial, tetapi tindakan melawan paradigma kolonial yang menjadikan manusia objek kekuasaan. Gereja Katolik mendukung pencapaian kebaikan ini dengan menghadirkan Sang Kebaikan Tertinggi dalam kehidupan umat dan masyarakat (Riyanto, 2025).

Etika Katolik dan politik, dalam pandangan ini, bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi dua jalan yang bisa berjalan selaras dalam membangun masyarakat yang manusiawi (Riyanto, 2025). Ketika politik difokuskan pada pencapaian kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, dan ketika Gereja berperan sebagai suara moral dan spiritual di tengah masyarakat, keduanya dapat membentuk sinergi yang membawa perubahan positif dan menyelamatkan. Dengan demikian, baik secara historis maupun teologis, keterlibatan Agama Katolik dalam proses dekolonisasi dan kehidupan politik merupakan bagian integral dari perjuangan untuk memulihkan martabat manusia dan membangun masyarakat yang adil. Dekolonisasi tidak hanya sebuah kenangan sejarah, tetapi menjadi panggilan terus-menerus untuk membebaskan manusia dari segala bentuk dominasi, dan memulihkan harkat kemanusiaan yang sejati melalui iman, tindakan, dan solidaritas sosial. Salah satu upaya konkret yang juga bisa dilakukan oleh kaum awam hingga saat ini untuk mengupayakan dekolonisasi di Indonesia yaitu dengan katekese. Katekese memang sejatinya berisi pengajaran iman, tetapi iman Kristiani tidak terlepas dari dunia. Iman Kristiani menjadi sumber pengharapan dan pedoman untuk menuju tata hidup bersama yang sejahtera, maka dari itu, seorang katekis sebenarnya tidak hanya sedang mengajarkan iman, tetapi juga sedang berkontribusi dalam membangun tata dunia yang sejahtera, yang tidak seorang pun merasa terjajah atau terbelenggu oleh dunia.

2.3.2 Katekis sebagai Agen Dekolonial

Pendidikan yang membebaskan bukan hanya untuk menciptakan masyarakat yang cerdas secara akademik, tetapi terutama masyarakat yang sadar secara sosial, kritis terhadap realitas, dan berani mengambil bagian dalam transformasi sosial demi terwujudnya keadilan dan kebebasan sejati (Smith, 2008). Pendidikan inilah yang menjadi fondasi utama dalam dekolonisasi yang sejati yaitu membebaskan pikiran, memperkuat kesadaran kolektif, dan membangun solidaritas dalam perjuangan melawan ketertindasan (Freire, 1972). Dalam dunia yang terus berubah, peran seorang katekis tidak bisa lagi dipahami sebatas pengajar agama saja. Lebih dari itu, katekis dipanggil menjadi pendamping iman yang menyadarkan, membebaskan, dan menghidupkan kembali martabat manusia. Pandangan ini menemukan resonansi mendalam dalam pemikiran Paulo Freire. Freire menempatkan pendidikan sebagai sarana pembebasan sejati, bukan sekadar transfer pengetahuan (Smith, 2008). Freire menyadari bahwa penindasan dalam masyarakat tidak hanya hadir dalam bentuk kekuasaan politik atau ekonomi, melainkan juga dalam bentuk ketidaksadaran manusia akan keadaan tertindas yang mereka alami. Freire menyebut bahwa masyarakat yang terbelenggu sering kali menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi alat penting untuk membuka mata, membangkitkan kesadaran, dan mengajak manusia bertindak melawan struktur yang menindas (Smith, 2008).

Pemikiran Freire sangat relevan dengan misi seorang katekis dalam Gereja. Seorang katekis sejati bukan hanya seseorang yang mengajar dogma, tetapi yang mendampingi umat untuk bertumbuh dalam iman yang dewasa dan sadar akan realitas hidupnya. Iman tidak berkembang di ruang hampa, tetapi dalam dinamika dunia nyata yang penuh tantangan, ketidakadilan, dan penderitaan. Oleh karena itu, katekese yang sejati tidak bisa berhenti pada hafalan doktrin atau rutinitas liturgi, melainkan harus membawa umat pada perjumpaan personal dengan Kristus, yang membebaskan dan menyembuhkan (Freire, 1972). Dalam konsep Freire, proses pendidikan yang membebaskan dimulai dari *conscientizacao*. Konsep yang diberikan oleh Freire itu berarti proses penyadaran kritis. Melalui dialog dan refleksi, manusia diajak untuk memahami realitas sosialnya, mengenali struktur ketidakadilan yang ada, dan menemukan kekuatan untuk mengubahnya (Freire, 1972).

Dalam konteks ini, seorang katekis berperan penting sebagai fasilitator dialog iman yang menyentuh hidup nyata umat. Katekese menjadi ruang di mana umat bertanya, merenung, dan menemukan jawaban Injil bagi persoalan hidup mereka. Freire membagi kesadaran manusia dalam tiga tingkat: magis, naif, dan kritis (Freire, 1973). Banyak umat hidup dalam kesadaran magis dengan menerima segala hal sebagai takdir, tanpa upaya mengubah keadaan. Tugas katekis adalah membantu mereka melampaui tahap ini, menuju kesadaran kritis menyadari bahwa

iman bukanlah pasrah membuta, tetapi undangan untuk bertindak dalam terang Roh Kudus, menjadi saksi kasih Allah dalam dunia. Dengan demikian, katekis menjadi jembatan antara ajaran Gereja dan realitas hidup umat.

Satu konsep penting lainnya dari Freire adalah *praxis*. Konsep itu mengacu pada perpaduan antara refleksi dan aksi (Freire, 1972). Dalam terang iman Kristiani, *praxis* ini adalah kehidupan yang selaras antara sabda dan tindakan, antara iman yang diwartakan dan kasih yang dihidupi. Seorang katekis tidak hanya menyampaikan pengajaran, tetapi menjadi teladan hidup Kristiani, menjadi saksi nilai-nilai Injil dalam keseharian, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pelayanan sosial (Satitis & Supriyadi, 2020). Lebih jauh lagi, pemikiran Freire juga sejalan dengan semangat Konsili Vatikan II yang mengangkat martabat dan peran umat awam dalam Gereja. Konsili menegaskan bahwa semua orang yang dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian dalam imamat, kenabian, dan rajani Kristus. Artinya, katekis sebagai bagian dari umat awam memiliki misi kerasulan yang nyata: menghadirkan Kerajaan Allah dalam dunia, menjadi garam dan terang, serta membangun tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi (Paus Yohanes Paulus II, 1979).

Di sinilah titik temu yang paling dalam antara Freire dan peran katekis yaitu keduanya bertujuan pada humanisasi yang menghasilkan pemulihan martabat manusia sebagai citra Allah. Bagi Freire, pendidikan harus memanusiakan kembali individu yang telah direndahkan oleh sistem. Bagi Gereja, pewartaan iman harus membawa manusia kembali pada panggilannya sebagai makhluk yang dikasihi, diciptakan untuk hidup dalam kasih dan keadilan. Seorang katekis tidak bisa tinggal diam dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tantangan seperti kemiskinan, kekerasan, polarisasi politik, degradasi moral. Katekis harus menjadi suara kenabian yang kritis namun penuh kasih, dan harus berani membela yang lemah, menyuarakan keadilan, serta membimbing umat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dunia yang lebih baik.

Pendidikan iman, dalam konteks ini, menjadi bagian integral dari dekolonisasi pikiran, pembebasan dari cara berpikir yang sempit, eksklusif, dan pasif. Maka, menjadi katekis hari ini bukanlah tugas ringan, tetapi panggilan luhur, bukan sekadar pengajar, tetapi pembebas. Katekis bukan sekadar penyampai ajaran, tetapi pembawa harapan. Seorang katekis yang terinspirasi oleh Paulo Freire adalah yang menghidupi Injil secara dialogis, kritis, dan penuh cinta, menyalakan kesadaran, dan menuntun umat pada hidup yang bermartabat dalam terang Kristus. Gagasan ini semakin relevan ketika diaplikasikan di Indonesia dengan tersebarnya luasnya umat Katolik. Peran katekis menjadi sangat penting ketika ada keterbatasan pelayanan imam, karena jumlah umat yang banyak dan tersebar di stasi-stasi. Contoh konkret dari fenomena tersebut terjadi di Paroki Ampah.

Salah satu katekis di Paroki Ampah, mengatakan bahwa peran katekis sangat signifikan karena keterbatasan jumlah imam yang berdampak pada kurangnya waktu untuk mengunjungi mereka setiap minggunya (Sumariata, 2024). Ketekese bisa disampaikan oleh katekis karena umat tidak bisa merayakan perayaan ekaristi setiap minggunya. Maka dari itu katekis juga bisa disebut sebagai perpanjangan Pastor Paroki untuk perkembangan dan pelayanan bagi umat (Jelahu, et al, 2021). Perkembangan dan pelayanan bagi umat itu diharapkan bisa menginternalisasikan nilai-nilai iman Kristiani dalam diri umat, sebab iman itu terkait erat dengan moralitas. *Evangelii Nuntiandi* menegaskan bahwa pewartaan iman harus menyentuh kehidupan konkret umat, termasuk dimensi etis dan sosialnya (EN 29). Karena itu, katekese tidak hanya menyampaikan doktrin, tetapi membentuk cara hidup yang selaras dengan Injil. Di sinilah signifikansi peran katekis.

Katekis berperan memampukan umat menjadi "murid-misioner" yang membawa terang Injil ke tengah masyarakat, dengan membina umat agar mengintegrasikan iman dan moral dalam kehidupan sehari-hari (EG 120). Akumulasi tindakan moral yang bersumber dari iman turut mewujudkan *bonum commune* sebagaimana dipahami Gereja sebagai kondisi sosial yang memungkinkan setiap orang berkembang dengan lebih baik (KGK 1906). Contoh lain dari aksi dekolonial yang dilakukan oleh katekis adalah pembinaan Orang Muda Katolik (OMK) untuk berpatisipasi dalam politik. Bimbingan dan motivasi bagi OMK dalam hal pendidikan moral yang diberikan oleh katekis menjadi fondasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Prameswara, 2024). Pendidikan ini diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri OMK dan terwujud dalam penerapan ajaran sosial Gereja dalam dinamika kehidupan politik (Lan, 2023).

2.3.3 Umat Katolik dan Politik di Indonesia: Antara Tantangan dan Peluang Menuju Masyarakat yang Membebaskan

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, keterlibatan umat Katolik dalam dunia politik sering kali berada di persimpangan antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, iman Katolik mengajarkan bahwa setiap umat dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Aplikasinya yaitu dengan terlibat aktif dalam membentuk masyarakat yang adil, bermartabat, dan mencerminkan kasih Allah. Di sisi lain, berbagai tantangan sosial, kultural, dan struktural kerap menjadi penghalang bagi umat untuk benar-benar ambil bagian dalam pembangunan politik yang transformatif, namun hal-hal yang menghambat itu bersifat eksternal bukan internal.

Hal-hal internal memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada hal-hal eksternal. Niat dan keinginan adalah kehendak yang berasal dari dalam diri seseorang. Kehendak dari dalam itulah sisi internal yang perlu digarap. Hambatan

sebenarnya bukanlah masalah bila sudah memiliki niat dari dalam diri, namun kehendak itu tidak akan terjadi bila rasa inferior tidak dihadapi dan dihilangkan. Armada menduga inferioritas menjadi penyebab utama hambatan umat katolik untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosio-politik di Indonesia. Inferioritas itu menunjukkan bahwa pikirannya masih dijajah, belum bebas dari perasaan rendah diri dan kurang yakin bahwa masyarakat akan menerima kiprahnya (Riyanto, 2025). Dengan kata lain, umat Kristen di Indonesia masih merasa sebagai minoritas dan kurang percaya diri dengan realitas yang mereka hadapi. Sebagian besar dari mereka masih terjebak dalam zona nyaman, takut mendapat penolakan dari luar, dan tidak mampu beradaptasi (Prameswara, 2024).

Inferioritas bukanlah hal yang muncul dengan sendirinya, namun terbentuk karena adanya situasi-situasi yang memengaruhinya. Martalia Odi dan Intansakti Pius X mengutip tulisan E. Imam Maksudi menyatakan bahwa situasi kenegaraan saat ini membuat sebagian umat Katolik merasa ragu untuk terlibat lebih berani dalam politik. Faktor-faktornya antara lain yaitu isu radikalisme dan terorisme yang menimbulkan ketakutan, moderasi beragama yang tidak berjalan sehat, politik yang sarat sentimen agama, egoisme sosial yang memengaruhi relasi antar lembaga dan kelompok, serta melemahnya idealisme kebangsaan yang terlihat dari sikap abai terhadap kelompok lemah dan minoritas (Odi & X, 2023). Selain itu, Gereja juga menghadapi tantangannya sendiri. Dalam dinamika politik nasional, kehadiran Gereja kerap terseret dalam tarik-menarik kepentingan sehingga bisa dianggap sebagai alat untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa Gereja Katolik merupakan warisan budaya Barat atau "agama penjajah," sehingga memengaruhi penerimaan masyarakat. Umat pun tidak jarang terpengaruh oleh cara pandang negatif terhadap lingkungan sosialnya (Odi & X, 2023).

Stigma negatif tentang kehidupan politik itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang bermuara pada keengganan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pernyataan itu ditegaskan dengan realita di kalangan orang muda katolik (OMK). Agustinus Abraham (2025) meneliti tentang partisipasi orang muda dalam dunia politik. Abraham berpendapat bahwa OMK tidak bergitu memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Keinginan dari dalam diri sendiri untuk bergabung dalam dunia politik sangat minim. Robbi, et al. (2024) memberi kejelasan tentang pernyataan Agustinus dengan menguraikan alasan keengganan OMK dalam dunia politik. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa kekecewaan akan politik (politik praktis) dapat bersumber dari realita tentang korupsi, ketidakadilan, atau ketidakmampuan sistem politik untuk menghasilkan perubahan yang positif dan bermakna. Persepsi tentang kegagalan dan kelemahan sistem politik dapat berujung pada sinisme dan keengganan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Kondisi nyata kelesuan beberapa umat katolik dalam dunia politik inilah yang menjadi titik berangkat para katekis untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kristiani pada jemaat sehingga umat kristiani memiliki spiritualitas dan religiusitas. Spiritualitas dan religiusitas jemaat juga harus berdampak pada kesalehan sosial dan energi spiritual jemaat dapat memelihara kepeduliannya terhadap berbagai problematika kehidupan sosial (Latumahina, 2021). Salah satu contoh orang katolik yang menunjukkan bahwa spiritualitas itu bermuara pada kesalehan sosial adalah Maria Yohana Esti Wijayati. Ia mengatakan bahwa bilapun dunia politik itu kotor, hendaknya umat katolik diajak untuk membersihkannya, bukan berhenti pada pikiran yang menghambat partisipasi dalam dunia politik. Keterhentian itu juga bisa berdampak pada keterhambatannya pewartaan kabar gembira (Wuarmanuk, 2019). Dua hal yang berseberangan ini tidak bisa disimpulkan sebagai kegagalan melainkan suatu peluang besar untuk merefleksikan kembali bagaimana umat Katolik dapat dan harus berkontribusi secara lebih bermakna dalam kehidupan sosio-politik bangsa Indonesia.

2.3.4. Pendidikan sebagai Pembebasan: Titik Berangkat Kesadaran Politik

Pemikiran Paulo Freire memberikan sumbangan penting untuk membaca ulang relasi antara pendidikan, kesadaran sosial, dan keterlibatan politik. Bagi Freire, pendidikan bukanlah sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan sarana pembebasan yang sejati. Ketertindasan dalam masyarakat sering kali tidak lahir dari kekuatan fisik semata, tetapi dari ketidaksadaran akan realitas yang menindas itu sendiri. Maka, pendidikan menjadi alat untuk membongkar struktur kekuasaan yang membungkam, serta membentuk individu menjadi agen perubahan yang sadar dan bertindak (Riyanto, 2025). Freire memperkenalkan konsep *conscientizacao*. Konsep yang ditawarkan oleh freire adalah proses penyadaran kritis yang memungkinkan seseorang membaca dunia secara reflektif dan bertindak untuk mengubahnya. Di sinilah keterlibatan umat Katolik, khususnya melalui peran katekis, menjadi sangat penting (Freire, 1972).

Fokus seorang katekis adalah Yesus Kristus (Sota & Wijaya, 2021). Yesus Kristus yang adalah manusia dan Tuhan. Yesus sebagai manusia memiliki pemikiran yang kritis akan kehidupan sehari-hari serta segala aturan yang ada pada zaman itu. Yesus tidak tinggal diam ketika melihat ketidakadilan yang terjadi (Yohanes 8:7). Yesus tetap mengikuti aturan yang bagi-Nya perlu untuk dilanjutkan dan mengkritisi serta melihat nilai yang lebih dalam dari suatu tradisi (Matius 12:9-15). Yesus adalah pengajar dan juga pembebas masyarakat. Pembebasan yang ditawarkan Yesus lebih dalam daripada apa yang tampak yaitu pembebasan dari dosa. Katekis yang mewartakan Yesus juga meneladani Yesus yang taat pada aturan tetapi juga berani untuk mengkritisi aturan yang membelenggu. Sebagaimana Yesus memberi kesadaran kepada para pendengar-Nya tentang kebebasan dari

keterbelengguan Yohanes 8:30-36), demikian jugalah katekis berperan dalam kehidupan sosio-politik. Katekis tidak hanya menjadi pengajar doktrin-doktrin Gereja Katolik, tetapi juga memberi pendampingan spiritual dan sosial yang menumbuhkan cara berpikir kritis, peka terhadap realitas, dan siap menghadapi tantangan zaman.

2.3.5. Umat Awam: Subjek Rasuli dalam Dunia Politik

Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II telah menegaskan bahwa umat awam memiliki peran aktif dan setara dalam mewartakan Injil serta menghadirkan tata keselamatan di dunia. Panggilan mereka bukan hanya di ruang liturgis atau pelayanan internal Gereja, tetapi juga dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan terutama politik (Paus Paulus VI, 1965). Politik dalam pandangan Gereja bukanlah arena kekuasaan yang kotor, tetapi sarana luhur untuk mencapai *bonum commune*. Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa umat Katolik pernah berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Gedung Pemuda Katolik digunakan dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda; para misionaris di Surabaya seperti Romo Smets CM turut bersuara menentang diskriminasi kolonial (Riyanto, 2025).

Semua ini menunjukkan bahwa relasi antara iman Katolik dan kehidupan politik bukanlah hal yang baru, melainkan warisan historis yang perlu dihidupkan kembali. Namun, perjalanan umat Katolik dalam politik tidak selalu mudah. Dalam konteks sebagai kelompok minoritas, umat kerap dihadapkan pada stigma, diskriminasi, dan keterbatasan representasi. Konteks tersebut menunjukkan inferioritas umat katolik yang takut bahwa kiprahnya di dalam dunia politik tidak diterima (Riyanto, 2025). Pandangan ini perlu dikoreksi. Justru karena politik menyangkut hidup bersama, maka iman Katolik menuntut kehadiran umat dalam merawat nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian dalam sistem yang ada.

2.3.6. Tantangan: Dari Kesadaran Magis ke Kesadaran Kritis

Salah satu tantangan utama umat Katolik adalah menggeser cara berpikir dari kesadaran magis dan naif menuju kesadaran kritis (Freire, 1973). Kesadaran magis membuat orang menerima realitas begitu saja, tanpa upaya untuk memahami atau mengubahnya. Sedangkan kesadaran kritis menuntut refleksi yang mendalam terhadap akar struktural ketidakadilan dan menumbuhkan semangat untuk bertindak. Di sini, katekis, pendamping umat, dan pelayan pastoral memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan semangat pendidikan pembebasan dalam pelayanan mereka. Katekese harus menjadi ruang dialog dan pembentukan nurani, tempat di mana iman tidak hanya disampaikan, tetapi dihidupi dalam konteks sosial yang nyata (Rani & Dewantara, 2023). Keterlibatan umat dalam politik bukan

hanya tugas segelintir orang yang duduk di parlemen, tetapi merupakan panggilan seluruh umat untuk berperan aktif sesuai kemampuan dan konteks masing-masing.

2.3.7. Peluang: Menghadirkan Keselamatan dalam Dunia Nyata

Di tengah tantangan tersebut, terbuka pula peluang besar bagi umat Katolik untuk menjadi agen transformasi sosial yang berlandaskan iman. Pendidikan Katolik yang mengedepankan nilai-nilai humanistik, keadilan sosial, dan solidaritas, telah melahirkan banyak pribadi yang siap berkontribusi dalam pelayanan publik. Keterlibatan umat di berbagai bidang strategis seperti hukum, pendidikan, media, kesehatan, dan bahkan pemerintahan, merupakan modal penting untuk membangun bangsa yang lebih adil dan manusiawi.

Umat Katolik dapat bergerak dari kontemplasi iman menuju aksi sosial-politik yang konkret dengan semangat *praxis* yang dinyatakan oleh Freire dalam pemikirannya. Freire menggunakan istilah itu untuk menunjukkan perpaduan antara refleksi dan tindakan. Keterlibatan ini tidak harus selalu dalam bentuk pencalonan politik formal; bisa juga berupa advokasi, pendidikan politik bagi masyarakat, keterlibatan dalam organisasi sosial, atau gerakan berbasis komunitas (Paus Paulus VI, 1965). Yang terpenting, umat Katolik diajak untuk tidak menjauh dari dunia, tetapi hadir di dalamnya, membawa terang iman dalam kegelapan struktur dunia yang sering kali melupakan nilai kemanusiaan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Implementasi skema kolaboratif katolik dan politik menurut Armada Riyanto mencapai suatu pemahaman konkret dalam peran katekis sebagai agen dekolonial menurut perspektif Freire. Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang membebaskan. Dalam terang iman Katolik, pembebasan itu menemukan maknanya yang paling dalam: yakni pemulihan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27). Gereja, melalui peran katekis, dipanggil untuk membentuk pribadi-pribadi yang bukan hanya saleh secara rohani, tetapi juga peka secara sosial dan berani terlibat dalam perjuangan keadilan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap dunia politik, umat Katolik justru dipanggil untuk hadir sebagai penanda harapan mereka yang tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga kepada martabat setiap manusia. Dengan membangun kesadaran kritis, memperkuat pembinaan iman, dan membentuk solidaritas sosial, umat Katolik dapat dan harus menjadi bagian dari jawaban atas tantangan zaman ini.

3.2 Saran

Melalui kajian ini, disadari bahwa peran katekis tidak hanya sebatas pendidik iman dalam ruang gerejawi, tetapi juga sebagai agen pembebasan dan transformasi sosial. Oleh karena itu**,** diperlukan pembaruan paradigma dalam pendidikan katekis di Indonesia, agar tidak hanya menekankan aspek dogmatis-liturgis, tetapi juga membekali katekis dengan kemampuan analisis sosial, pendidikan kritis, dan praksis pastoral yang kontekstual**.** Lembaga pendidikan calon katekis diharapkan mengintegrasikan pemikiran Paulo Freire dalam kurikulum pembelajaran, khususnya melalui pelatihan *conscientization* dan *praxis*, agar katekis mampu menumbuhkan kesadaran kritis umat terhadap realitas sosial-politik. Secara akademik, kajian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai model katekese kritis-kontekstual, baik secara teologis maupun praktis, sebagai kontribusi terhadap pengembangan teologi kontekstual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, A. (2025). Partisipasi Orang Muda Katolik Dalam Dunia Politik: Tinjauan Sistematik Literature. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, *25*(2), 416–428. https://doi.org/10.34150/jpak.v25i2.965

Adlini, M. N., et al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Cipta, S. E. (2020). 100% Katolik 100% Indonesia: Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Nasionalisme Umat Katolik di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, *14*(1), 175. https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-07

Freire, P. (1972). *Pedagogy Of The Opressed*. Middlesex: Penguin Books.

Freire, P. (1973). *Education For Critical Consciousness*. New York: The Seaburry Press.

Jelahu, A. J., et al. (2021). Peran Katekis dalam Tata Perayaan Ibadat Sabda di Paroki Santo Petrus dan Paulus Ampah. *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik*, *7*(1), 13–27.

Lan, Y. F. (2023). Integrasi Ajaran Sosial Gereja dalam pendidikan formal: Membentuk generasi muda Katolik sebagai agen sosial. *Credendum: Jurnal Pendidikan Agama*, *5*(1), 35–47. https://doi.org/10.34150/credendum.v5i1.783

Latumahina, V. (2021). Peran Gereja Dalam Menanggapi Kemiskinan. *Jurnal Teologi Biblika*, *6*(1), 29–36. https://jurnal.stt-biblika.ac.id/index.php/jtb/article/view/73

Odi, M., X, I. P. (2023). Peran Gereja Dalam Mempersiapkan Umat Katolik Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan*

Katolik, *1*(4), 47–56. https://doi.org/10.62200/magistra.v1i4.54

Paus Paulus VI. (1965). *Apostolicam Actuositatem [Dekrit tentang Kerasulan Awam]*. Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana.

Prameswara, A. Y. (2024). Peran katekis dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi generasi muda pada Pemilu tahun 2024. *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, *2*(1), 143–151. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jutipa.v2i1.246

Rani, N. M., Dewantara, A. W. (2023). Pengembangan Karakter Pancasila pada Mahasiswa Calon Katekis dan Guru Agama Katolik Sebagai Upaya Meminimalisir Budaya Menyontek. *CREDENDUM : Jurnal Pendidikan Agama, 5*(20), 100–108. https://doi.org/10.34150/credendum.v7i1.827

Rista, D., Budianto, A. (2024). Dari Sumpah Palapa hingga Sumpah Pemuda Sebagai Refleksi Nilai Persatuan dan Kesatuan terhadap Kehidupan Bangsa Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran*, *4*, 119–129.

Riyanto, A. (2025). *Dekolonisasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Robbi, C., et al. (2024). Menganalisis Pemahaman Orang Muda Katolik Tentang Politik Praktis di Stasi Sta. Maria Goreti Aramengi Paroki Salib Suci Hoelea Keuskupan Larantuka. *Pastoralia*, *5*(1), 44–55. https://doi.org/10.70449/pastoral.v5i1.137

Sardy, M. (1983). *Filsafat Pendidikan Paulo Freire, Kapita Selekta Masalah-Masalah Filsafat*. Bandung: Penerbit Alumni.

Satitis, H., Supriyadi, A. (2020). Pengaruh Semangat Katekis Bagi Pelaksanaan Magang Pada Mahasiswa Stkip Widya Yuwana. *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, *2*(1), 22–31. https://doi.org/10.34150/credendum.v2i1.269

Smith, W. A. (2008). *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sota, Y. S., Wijaya, A. I. K. D. (2021). Pengaruh Perayaan Ekaristi Terhadap Pembentukan Spiritualitas dan Pendidikan Calon Katekis di STKIP Widya Yuwana. *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, *3*(1), 46–51. https://doi.org/10.34150/credendum.v3i1.892

Wiyesi, A., Lan, Y. F. (2025). Menguatkan Kepedulian Sosial Siswa Melalui Pendidikan Nonformal. *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, *5*(1), 69–78. https://doi.org/10.34150/credendum.v5i1.906

Wuarmanuk, Y. H. (2019). Ragi Katolik di Tahun Politik. *Hidupkatolik.com.* https://www.hidupkatolik.com/2019/03/20/34001/ragi-katolik-di-tahun-politik.php

Yohanes Paulus II, P. (1979). *Catechesi Tradendae (Penyelenggaraan Katekese)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.